

4.082 Kades, Perangkat Desa serta BPD di Cilacap Terima THR Idul Fitri

Oleh: Reny Tania -- Editor: Robin Abdulrahman -- 26 Mar 2024 - 16:08



Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri/Instagram @awaluddin_muuri_06

KBRN, Cilacap : Pemerintah Kabupaten Cilacap akan kembali memberikan tunjangan Hari Raya atau gaji ke-14 kepada Kepala Desa, perangkat dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa di 269 desa yang ada di 24 kecamatan. Pencairan THR ini akan dilaksanakan mulai hari ini Selasa (26/3/2024).

Penerimaan THR bagi kades dan perangkatnya di Cilacap ini menjadi tahun kedua, di mana mulai Lebaran 2023 lalu, sudah diberikan.

Tahun ini, Pemkab Cilacap menyiapkan sekitar Rp 10,9 miliar untuk tunjangan Hari Raya bagi kades, perangkat desa serta tunjangan kedudukan BPD.

Secara rinci untuk THR Kades dan perangkat desa senilai Rp 10,3 miliar yang akan diberikan kepada 4.082 perangkat, dan tunjangan kedudukan BPD ke-14 sebesar Rp 696,5 juta yang diberikan kepada 1.721 anggota.

"THR yang akan diterima oleh kades, perangkat dan juga BPD ini sebesar satu kali penghasilan tetap dan mekanismenya nanti pencairannya akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing desa," ujar PJ Bupati Cilacap Awaluddin Muuri.

Pj Bupati mengatakan jika tunjangan ke-13 dan ke-14 diberikan kepada kades dan perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 130 tahun 2024. Dimana gaji ke-13 diberikan sebagai tunjangan pendidikan yang akan dibagikan pada bulan juni, dan gaji ke-14 merupakan THR hari Raya Idul Fitri.

"Gaji ke-14 dulu yang dicairkan dan menyusul gaji ke-13," katanya.

Tunjangan Hari Raya ini diberikan kepada para kades, perangkat desa, dan BPD sebagai bentuk apresiasi Pemkab Cilacap atas kinerja yang telah dilakukan dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan stunting hingga pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kaur Kesra Desa Adimulya Kecamatan Wanareja, Iis Kurtyono sekaligus Ketua Paguyuban Perangkat Desa (PPDI) Kabupaten Cilacap mengaku senang mendapatkan perhatian dari Pemkab Cilacap dengan memberikan THR bagi para Kades, perangkat desa maupun BPD.

"Alhamdulillah, terimakasih kepada Pj dan jajarannya, kami jadi merasa diayomi dan diperhatikan. Ini menjadi tahun kedua menerima THR," katanya.

Pemberian THR kepada kepala desa, dan perangkatnya tidak diantur oleh pemerintah pusat. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan jika kepala desa maupun perangkat desa tidak bisa mendapat THR karena mereka tidak tergolong sebagai ASN.

Namun, berbeda dengan Pemkab Cilacap yang telah menganggarkan THR bagi Kades, perangkat desa dan BPD.(ren)